

## Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota oleh Partai Politik di Kota Semarang Tahun 2015

Amanda Dewi Mahardhika<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

### Article Info

#### Article history:

Received Sept 12<sup>th</sup>, 2017  
 Accepted Nov 26<sup>th</sup>, 2017  
 Published Jan 15<sup>th</sup>, 2018

#### Keyword:

Political Parties; Political Recruitment; election

### Abstract

*The purpose of this research is to describe: 1) the nomination of the Mayor and Vice Mayor by the Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan and the Partai Kebangkitan Nasional in Semarang by 2015 and 2) differentiation in the nomination of the Mayor and Vice Mayor by the Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia and the Partai Kebangkitan Nasional in Semarang by 2015. The research approach is Qualitative. The research focus on: 1) the nomination of the Mayor and Vice Mayor by the Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan and the Partai Kebangkitan Nasional in Semarang by 2015 and 2) differentiation in the nomination of the Mayor and Vice Mayor by the Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia and the Partai Kebangkitan Nasional in Semarang by 2015. Data is obtained through interviews, documentation, and library studies. Triangulation technique is used as the data validity. Interactive model is used as data analysis. The results of this research are: 1) the nomination of a mayor and a vice Mayor in Semarang by PDI-P has been conducted in accordance with the rules of the PDI-P party number 4 year 2015 about the Recruitment and selection of Head Regional and Deputy Regional candidates of PDI-P from article 10 to article 19. In addition, the recruitment process is divided into 3 main stages that are networking, screening and the determination of the candidates. In the PKB party candidacy of Mayor and Deputy Mayor have been adapted to the provisions of the party and the AD/ART party's into six stages that's are; preparation phase with the formation of the collecting and screening team, the stage of registration, verification, interview, selection, and the determination of the candidates. 2) differentiation of candidacy of the Mayor and Deputy Mayor in Semarang by PDI-P and PKB is based on five things.*

**Paper type:** Research Paper

Copyright © 2018 Unnes Political Science Journal. All rights reserved.

#### How to cite (APA Style):

Mahardhika, A. (2018). Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota oleh Partai Politik di Kota Semarang Tahun 2015. *Unnes Political Science Journal*, 2(1), 10-19. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/upsj/article/view/21650>  
 More Citation Formats

## PENDAHULUAN

#### Corresponding Author:

Universitas Negeri Semarang, Indonesia  
 Jl. Raya Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229, Indonesia.  
 Email: amanda.mahardhika17@gmail.com

Di Indonesia pasca reformasi tahun 1998, Partai Politik (Parpol) memiliki kedudukan yang semakin penting dalam sistem politik Indonesia. Dalam konteks implementasi kedaulatan rakyat, mekanisme demokratis yang lebih luas adalah pelaksanaan pemilihan umum, baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilihan Langsung Kepala Daerah (Pemilukada). Mencermati ketentuan di atas dapat diketahui bahwa partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Pemilu sering dianggap sebagai penghubung antar prinsip kedaulatan rakyat dan praktek pemerintahan oleh sejumlah elite politik. Setiap warga Negara yang sudah dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan menurut undang-undang dapat memilih wakil mereka di parlemen, termasuk pemimpin mereka di pemerintahan. Kepastian bahwa hasil pemilihan itu mencerminkan kehendak rakyat diberikan oleh seperangkat jaminan yang tercantung dalam persatuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum. (F. S Swantoro, 1997: 181)

Terwujudnya fenomena di atas dilakukan melalui mekanisme rekrutmen politik yang diterapkan oleh partai politik biasa dimulai dari menjaring calon. Rekrutmen politik merupakan fungsi politik dari partai politik itu sendiri. Menurut Gabriel A. Almond partai politik memiliki beberapa fungsi yaitu sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, komunikasi politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, pembuatan kebijaksanaan. (Efriza, 2012:235)

Partai politik yang memiliki fungsi rekrutmen politik berperan besar dalam menghadirkan sosok yang akan menjadi wakil rakyat di pemerintahan, semakin baik proses rekrutmen yang dilakukan partai politik, maka semakin baik pula tokoh yang akan dihadirkan dalam parlemen, begitupun sebaliknya, semakin jelek proses rekrutmen yang dilakukan maka akan jelek pula tokoh yang akan dihadirkan di daerah. Jika setiap partai politik sadar akan hal tersebut, maka seharusnya parlemen di Indonesia banyak dipenuhi oleh tokoh yang berkualitas sesuai dengan proses rekrutmen partai, namun sayang sepertinya hal tersebut masih berupa harapan karena masih banyak wakil rakyat yang malas bahkan masih banyak yang terlibat kasus korupsi yang pastinya sangat merugikan rakyat.

PDI-Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa boleh dikatakan sebagai partai besar. Pada proses rekrutmen calon walikota dan wakil Walikota PDI-Perjuangan dan partai Kebangkitan Bangsa, masih ada beberapa yang menjadi kelemahan-kelemahannya, diantaranya adalah proses rekrutmen caleg yang dilakukan belum berjalan sesuai

dengan mekanisme yang dikeluarkan partai dan masih tertutupnya proses rekrutmen yang dilakukan.

Keikutsertaan PDI-Perjuangan dan PKB pada Pemilu kali ini dilakukan untuk mempererat kerjasama intern dalam pemenangan calon yang diusung. Begitu juga keinginan masyarakat ada kerja-kerja konkret dari walikota terpilih. Dengan ini, dilakukan rekrutmen pencalonan Walikota dan Wakil Walikota yang akan memberikan kinerja terbaik untuk masyarakat.

PDI-Perjuangan dan partai Kebangkitan Bangsa akan merekrut calon Walikota dan Wakil Walikota dengan menerapkan pola baru dan proses yang lebih ketat, agar dapat memunculkan wakil rakyat terbaik di pemilu tahun mendatang, juga untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap mekanisme rekrutmen bakal calon Walikota dan Wakil Walikota yang dalam prosesnya terhindar dari praktek kolusi dan nepotisme, sehingga rakyat akan mendapatkan calon yang berkualitas.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan: 1) pencalonan Walikota dan Wakil Walikota di kota Semarang oleh partai PDIP dan PKB dan 2) perbedaan dalam pencalonan Walikota dan Wakil Walikota di kota Semarang oleh partai PDIP dan PKB.

Hasil dari penelitian yang peneliti lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis diharapkan dapat: 1) Menunjukkan adanya perbedaan pencalonan partai politik yang berlangsung dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di kota Semarang, 2) Dalam wilayah akademis, memperkaya khasanah kajian ilmu politik untuk perkembangan keilmuan. 3) Untuk memberikan informasi kepada penulis tentang pencalonan Walikota dan Wakil Walikota di kota Semarang oleh PDIP dan PKB. Kemudian secara praktis, penelitian ini diharapkan: 1) memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat dalam memahami realitas politik dan rekrutmen politik. 2) memberikan informasi sebagai bahan perbandingan dalam memahami pencalonan politik pada masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang peneliti laksanakan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2014:9). Dalam penelitian ini

yang menjadi focus penelitian adalah 1) pencalonan Walikota dan Wakil Walikota oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa di Kota Semarang tahun 2015 dan 2) perbedaan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa di Kota Semarang tahun 2015. Penelitian ini dilaksanakan di DPC PDIP dan DPC PKB kota Semarang. Sumber data dapat diperoleh melalui informan. Data yang diperlukan dalam penelitian dikaji dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari subjek penelitian yang terdiri atas: pengurus DPC PDIP kota Semarang dan pengurus DPC PKB kota Semarang. Sementara data sekunder diperoleh dari arsip atau dokumen –dokumen DPC PDIP dan DPC PKB kota Semarang, seperti catatan hasil penelitian, visi dan misi partai PDIP dan PKB, Peraturan PDIP terkait rekrutmen, Surat Keputusan PKB tentang rekrutmen, AD/ART PKB dan data-data penunjang lainnya terkait pencalonan Walikota dan Wakil Walikota di kota Semarang. Data dari penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka dengan teknik triangulasi guna memperoleh keabsahan data yang selanjutnya dianalisis melalui interactive model.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Mekanisme peraturan partai yang ada di PDI Perjuangan peraturan yang sudah tertata dan baku yang tertuang dalam AD/ART partai. Berdasarkan isi dari peraturan/surat keputusan tersebut dapat dijabarkan bahwa rekrutmen pencalonan walikota dan wakil walikota Semarang melalui 3 tahap berikut ini:

1. Penjaringan Bakal Calon

Proses penjaringan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang dilakukan dengan ketentuan terdiri dari (1) Pendaftaran bakal calon Walikota dan Wakil Walikota; (2) verifikasi; dan (3) survey politik.

2. Penyaringan Bakal Calon

DPD Partai melalui Rapat pleno DPD Partai melakukan penyaringan tahap pertama terhadap bakal calon Walikota dan Wakil Walikota. Penyaringan tahap pertama dilakukan dengan mempertimbangkan: (a) soliditas Partai; (b) komitmen calon terhadap penggunaan mesin politik Partai; (c) hasil survey terkait dengan elektabilitas bakal calon; (d) kekuatan dukungan ril bakal calon untuk

memenangkan pemilukada; dan, (e) pemetaan politik yang dilakukan DPD Partai, khususnya terhadap peluang bakal calon untuk memenangkan Pemilukada.

Penyaringan tahap pertama dilakukan dengan memanggil bakal calon dan dengan mendengarkan pendapat DPC Partai. DPD partai sekurang-kurangnya merekomendasikan 2 (dua) bakal calon Walikota dan Wakil Walikota untuk diusulkan ke DPP Partai.

Menurut Bpk. Untung selaku pengurus Partai PDIP Cabang Semarang bahwa nama-nama hasil penyaringan tahap pertama tersebut, oleh DPP partai dilakukan penyaringan tahap 2 guna menetapkan pasangan calon dengan mempertimbangan hasil survey, dukungan internal partai, hasil psikotes, dan peluang memenangkan pilkada.

### 3. Penetapan Calon

Calon Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan berdasarkan penyaringan tahap 1 dan 2 yaitu Bp. Haji Hendrar Prihadi sebagai bakal calon Walikota dan Ir.Hj Hevearita Gunaryanti Rahayu sebagai bakal calon Wakil Walikota kota Semarang. Calon yang sudah dipilih oleh DPP partai ditetapkan dengan Surat Keputusan sebagai pasangan calon untuk kemudian diserahkan kepada DPD Partai dan DPC partai untuk di daftarkan ke KPU Kota Semarang. Seluruh jajaran partai, anggota dan kader partai serta alat kelengkapan partai berkewajiban memperjuangkan calon yang sudah ditetapkan DPP Partai dalam rangka pemenangan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.

Alasan pemilihan Hendi sebagai calon wali kota Semarang adalah hasil survey yang menyatakan bahwa Hendi sebagai figur “incumbent” memiliki elektabilitas dan popularitas yang kuat karena selama ini kedekatan yang dibangun Hendi sebagai wali kota kepada masyarakat sangat erat dengan banyaknya intensitas turun ke tengah masyarakat.

Alasan pemilihan Ir.Hj Hevearita Gunaryanti Rahayu sebagai calon wakil walikota Semarang adalah karena memiliki memiliki hasil survey tertinggi dibandingkan dengan bakal calon lainnya, selain itu akan lebih mewakili sebagai representasi kaum perempuan. Pada Partai Kebangkitan Bangsa Proses rekrutmen dalam penentuan calon Walikota dan Wakil Walikota pada PKB dilakukan melalui 6 tahapan, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan ini kegiatan yang dilakukan oleh PKB yaitu membentuk sebuah tim yaitu tim yang bertugas sebagai penjaring dan penyaring. Tim persiapan atau yang disebut desk Pilkada PKB dibentuk sesuai instruksi DPP PKB melalui surat No 2336/DPP-03/VI/A.1/1/2015 tentang petunjuk pelaksanaan pilkada bakal calon PKB.

## 2. Tahap Pendaftaran

Pada tahap pendaftaran ini para calon diberikan formulir pendaftaran untuk kemudian diisi sesuai dengan data-data informasi tentang calon yang diperlukan untuk kelengkapan administrasi. Tata cara dan syarat pendaftaran dalam kegiatan pendaftaran, tim yang sudah dibentuk telah menetapkan tata cara dan syarat pendaftaran untuk calon yang hendak mendaftar.

## 3. Tahap Verifikasi

Tahapan verifikasi ini bertujuan untuk menjamin berjalannya seleksi secara transparan atas dasar kriteria yang ditetapkan partai PKB setiap pengurus partai pada masing-masing tingkatan partai yang memiliki kewenangan di dalam penyaringan. Pada tahap verifikasi ini kegiatan yang dilakukan adalah meneliti kebenaran dan keabsahan atau seluruh kelengkapan persyaratan bakal calon.

## 4. Tahap Interview

Interview dilakukan oleh ketua DPC, Sekretaris DPC. Proses interview juga dilakan pada tingkat DPP yang berguna untuk melihat dan menimbang kualitas dan kapabilitas dari bakal calon.

## 5. Tahap Seleksi Khusus

Pada tahap seleksi khusus ini PKB melakukan kegiatan survei dan pengkajian terhadap nama-nama bakal calon yang telah terjaring tersebut dan ketua DPC partai PKB akan untuk melakukan Fit and Proper Test (uji kepatutan dan kelayakan) terhadap calon dalam rangka mengetahui tingkat elektibilitas seluruh bakal calon yang diusulkan. Seluruh pasangan bakal calon walikota Semarang dari PKB diwajibkan mengikuti seleksi ini.

## 6. Tahap Penetapan Calon

Penetapan calon kepala daerah dilakukan melalui rapat kerja partai, yang terdiri atas rapat kerja cabang, yang diadakan untuk menyaring bakal calon

yang telah diverifikasi. Dalam hal ini, pengambilan keputusan untuk menetapkan calon dilakukan oleh DPP PKB.

Hasil penetapan pasangan calon wali kota dan wakil walikota Semarang dalam Pilkada 2015 yaitu Soemarmo Hadi Saputro berpasangan dengan Zuber Safawi yang merupakan kader PKS. Partai PKS memilih Sumarmo sebagai calon walikota dengan 3 alasan yaitu (1) Soemarmo komit taat hukum termasuk akan mengumumkan status beliau yang pernah dialami; (2) PKS menawarkan pakta integritas kepada Soemarmo untuk membuat pemerintah bersih; dan (3) PKS menyodorkan kader yang selama 15 tahun berkiprah di parlemen cukup baik (Keterangan dari Bpk. Agung Budi Margono selaku ketua PKS Kota Semarang). Soemarmo dianggap masih memiliki kredibilitas yang baik meskipun menurut hukum beliau kemarin melakukan pelanggaran hukum. Namun bagi sebagian masyarakat yang dilakukan Soemarmo dengan tujuan baik.

Setiap partai politik memiliki proses rekrutmen yang berbeda-beda karena ideologi masing-masing partai juga berbeda. Perbedaan proses pencalonan walikota dan wakil walikota antara PDIP dengan PKB adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan proses persiapan pencalonan

Perbedaan pertama antara PDIP dengan PKB dalam rekrutmen pencalonan Walikota dan Wakil Walikota adalah proses persiapan. Pada PDIP ada proses persiapan sebelum pendaftaran yaitu membentuk tim penjaringan sedangkan pada partai PKB, proses persiapan menetapkan tim penjaring dan penyaringan secara khusus sehingga dapat melakukan proses rekrutmen dengan lancar yang disebut desk partai PKB.

2. Perbedaan proses survey

Perbedaan kedua yaitu dalam proses survey. PDIP dalam melakukan rekrutmen melakukan survey politik dengan menggunakan lembaga survey independen yang memiliki kredibilitas tinggi sehingga diharapkan hasil survey benar-benar dapat memperlihatkan elektabilitas, kredibilitas, popularitas dan kapabilitas bakal calon. Pada partai PKB, melakukan survey politik terhadap bakal calon dengan menggunakan tim survey dari partai PKB sendiri.

3. Perbedaan tes kepada bakal calon

Tes yang harus dilalui oleh bakal calon Walikota dan Wakil Walikota pada Partai PDIP dan Partai PKB ada sedikit perbedaan. PDIP melakukan serangkaian tes umum yang ditetapkan oleh KPU terhadap pasangan calon seperti misalnya tes wawasan kebangsaan termasuk kebangsaan dan tentang ideologis, tes kesehatan dan psikotes. PDIP juga melaksanakan 'fit and proper test' yang dilakukan DPP. Sedangkan pada partai PKB tes yang diberikan kepada bakal calon selain tes-tes yang ditetapkan oleh KPU juga melakukan Fit and Proper Test (uji kepatutan dan kelayakan) di DPW PKB Jawa Tengah terhadap calon dalam rangka mengetahui tingkat elektibilitas seluruh bakal calon yang diusulkan.

#### 4. Perbedaan peran DPP dalam penetapan calon

Partai PDIP di tingkat DPP sudah tidak melakukan tes wawancara lagi karena telah dilakukan pada saat di tingkat DPC, sedangkan pada partai PKB selain di tingkat DPC tes wawancara juga dilakukan di tingkat DPP sehingga DPP dapat memberikan dan menetapkan bakal calon menjadi calon Walikota.

#### 5. Perbedaan biaya pendaftaran pencalonan

Pada umumnya setiap partai tidak memungut biaya kepada calon Walikota dan Wakil Walikota dalam proses rekrutmen. Namun biaya administrasi atau biaya pendaftaran tetap ada sebagaimana pada partai PDIP yang memberikan tarif biaya pendaftaran diduga minimal sebesar Rp. 5000.000; untuk segala keperluan pada proses penjarangan dan penyaringan (tes-tes). Akan tetapi jika bakal calon tersebut tidak diterima menjadi calon maka biaya tersebut akan dikembalikan secara penuh.

Pada partai PKB, setiap bakal calon yang mendaftar menjadi calon walikota dan wakil walikota tidak dipungut biaya pendaftaran atau biaya administrasi. Biaya-biaya untuk proses rekrutmen murni berasal dari anggota partai dan dana yang memang khusus dialokasikan untuk proses rekrutmen.

#### 6. Perbedaan pertimbangan status keanggotaan

Pada partai PDIP, status keanggotaan partai PDIP calon walikota dan wakil walikota tidak menjadi pertimbangan utama. Partai PKB lebih mementingkan calon yang berasal dari anggota atau kader partai. Hal ini dapat dilihat dari keputusan PKB yang memilih Soemarmo sebagai calon walikota yang merupakan ketua PKB Kota Semarang dan memilih Zuber Safawi sebagai calon wakil walikota yang merupakan kader PKS. Pemilihan calon yang berasal dari internal partai/kader partai dengan pertimbangan kesamaan visi dan ideologi partai.



Partai PDIP dan PKB menggunakan rekrutmen terbuka sesuai teori dari Fadillah Putra (2003:209) yaitu syarat dan ketentuannya diketahui oleh masyarakat luas. Jadi disini partai politik mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Kerena menjaring calon langsung dari tengah-tengah masyarakat. Cara ini dianggap sangat efektif karena sangat demokratis sehingga masyarakat bisa mengontrol langsung legitimasi politik para elitnya.

Hal ini sesuai pendapat dari Surbakti (2007:112) bahwa setiap partai politik memiliki asas dan orientasi yang berbeda antara satu dengan lainnya yang disebut tipologi partai politik. Semakin banyak kepentingan politik yang diusung oleh partai politik dalam suatu negara, maka ini mencerminkan bahwa kepentingan masyarakat yang ada di negara tersebut beragam.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Mekanisme Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Semarang Oleh Partai PDIP dan PKB. Mekanisme pencalonan walikota dan wakil walikota oleh partai PDIP Kota Semarang melalui 3 tahapan yaitu penjaringan bakal calon, penyaringan bakal calon dan penetapan calon.
2. Mekanisme pencalonan walikota dan wakil walikota oleh partai PKB Kota Semarang melalui 6 tahapan yaitu tahap: (1) persiapan (pembentukan tim penjaring dan penyaring yang disebut desk Pilkada PKB), (2) pendaftaran, (3) verifikasi, (4) interview, (5) seleksi khusus, (6) penetapan calon.
3. Perbedaan mekanisme pencalonan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Semarang oleh Partai PDIP dan PKB terletak pada 5 (lima) hal yaitu: (a) Perbedaan proses persiapan rekrutmen. Tugas tim penjaringan PDIP selesai setelah ditetapkan calon walikota dan wakil walikota. Namun pada PKB tugas dari tim ini hingga menjadi tim pemenangan atas calon terpilih. (b) Perbedaan proses survey. PDIP melakukan survey politik dengan menggunakan lembaga survey independen sedangkan PKB memiliki tim survey dari partai koalisi dan PKB sendiri. (c) Perbedaan tes kepada bakal calon. PDIP melakukan serangkaian tes umum dan melaksanakan 'fit and proper test' yang dilakukan DPP PDIP sedangkan PKB memberikan tes-tes yang ditetapkan oleh KPU dan juga melakukan Fit and Proper Test di DPW PKB Jawa

Tengah. (d) Perbedaan peran DPP dalam penetapan calon. DPP PDIP sudah tidak melakukan tes wawancara dan kewenangan memilih calon berada ditangan ketua DPP sedangkan pada PKB, DPP masih melakukan tes wawancara untuk menetapkan pasangan calon. (e) Perbedaan biaya pendaftaran pencalonan, PDIP memberikan tarif biaya pendaftaran sedangkan pada PKB tidak ada. (f) perbedaan pertimbangan status keanggotaan, PDIP mempertimbangkan bakal calon dari eksternal sedangkan pada PKB lebih memilih calon yang berasal dari internal partai.

## SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut: (1) Hendaknya calon yang telah terseleksi memiliki kemampuan yang kompetitif, sebaiknya perlu melakukan pendidikan politik dan penguatan jati diri dari setiap calon, agar calon-calon tersebut mempunyai konsistensi dengan apa yang telah menjadi kewajiban dalam penyelenggaraan urusan pemerintah. (2) Perlu ditingkatkan sistem yang demokratis dalam tubuh partai. (3) Hendaknya partai melakukan musyawarah bersama seluruh anggota ketika mengambil keputusan, mengingat selama ini semua keputusan partai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, U. M., Arditama, E., & Seftyono, C. (2017). Relawan: Dari Gerakan Sosial ke Proyek Politik. *Religion, State and Society: Exploration of Southeast Asia*. 140.
- Efriza. (2012). *Political Explore*, Bandung: Alfabeta. Hal 235.
- Kristianus, K. (2016). Politik dan Strategi Budaya Etnik dalam Pilkada Serentak di Kalimantan Barat. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(1), 87-101. doi:<http://dx.doi.org/10.15294/jpi.v1i1.9182>
- Putra, Fadillah. (2003) *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.hal 209
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.hal 318, hal 329
- Surbakti, Ramlan. (2007). *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo.hal 118
- Swantoro, F. S. *Jurnal Analisis CSIS*, (1997). *Kampanye dan Profil Pemilu 1997*. Pemilu Mengebiri Demokrasi. Hal 181